

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI PPMHKP DENPASAR
TRIWULAN I TAHUN 2026



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026



Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2026

Responden Laki-Laki

122

Responden Perempuan

29

Sebaran Usia

45-46	25-45	<25
0,66 %	39,74 %	59,60 %



Nilai SKM



97.61



151 Responden



Resume SKM Layanan Triwulan 1 tahun 2026

● Sertifikat SMKHP	97.97		134
● LHU Mutu Produk Perikanan	97.22		9
● Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	90.91		4
● Sertifikat HACCP	91.67		3
● Sertifikat CPIB	97.22		1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Kuesioner Online	14
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	16
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai PPMHKP Denpasar sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai PPMHKP Denpasar adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/3> (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2026	8
2.	Pengumpulan Data	Januari - Maret 2026	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Maret 2026	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Maret 2026	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada PPMHKP Denpasar periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai PPMHKP Denpasar dalam kurun waktu triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 151 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 151 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 151 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	122	81%
		Perempuan	29	19%
				100%
2	Usia	<25	89	59%
		25-45	60	39%
		46-60	2	2%
		>60	0	0%
				100%
3	Pendidikan	SD	1	1%
		SMP	0	0%
		SMA	32	22%
		D3	86	57%
		S1	31	21%
		S2	1	1%
		S3	0	0%
				100%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	7	5%
		Pegawai Swasta	126	84%
		Wirausaha Non KKP	1	1%
		Pelajar/Mahasiswa	17	12%
				100%
5	Jenis Layanan	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	9	6%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	3	2%
		Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	134	88%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	4	3%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Nomer Registrasi Unit Pengolahan Ikan Ke Negara Mitra (Approval Number)	0	0%

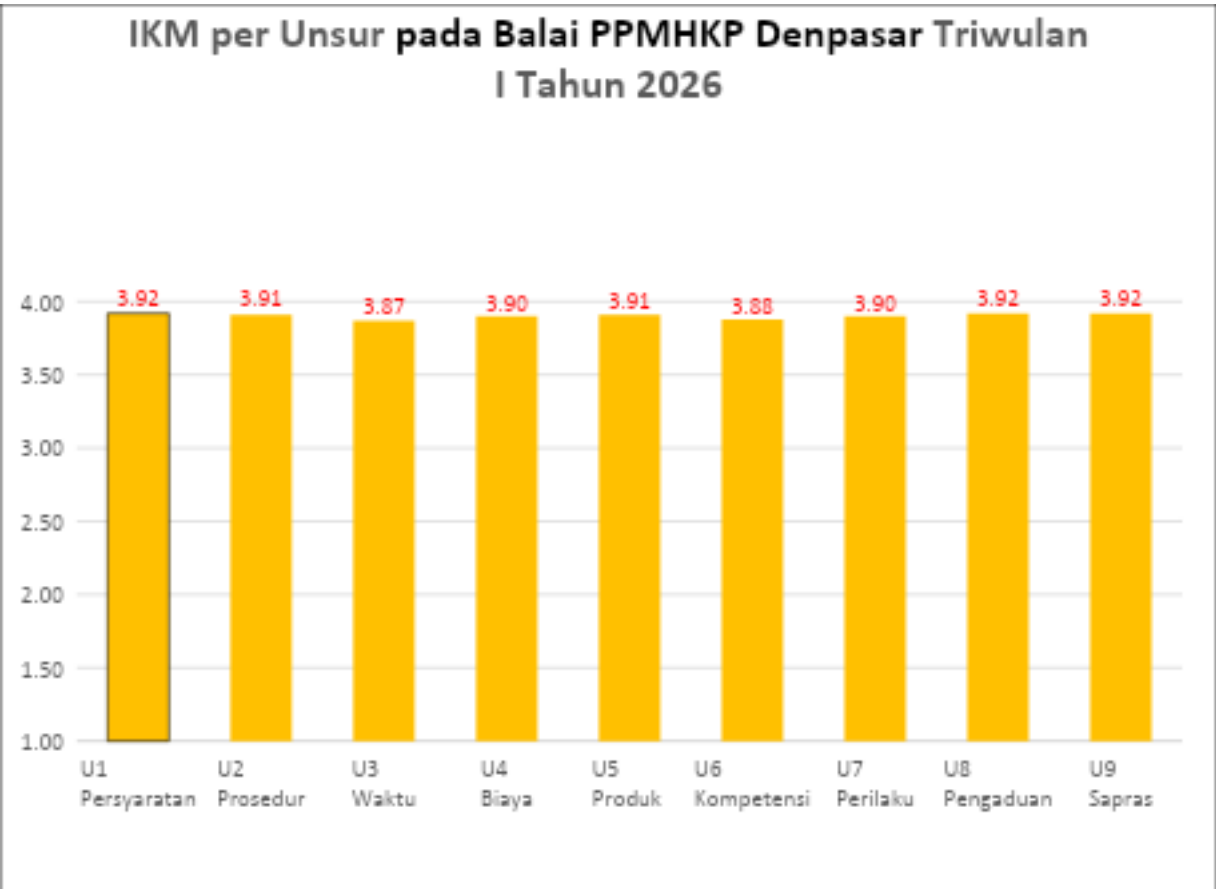
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	97.61 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah **Waktu Penyelesaian** nilai terendah yaitu 3,87 Selanjutnya nilai terendah kedua ialah **Kompetensi pelaksana** mendapatkan nilai 3,88 dan **Biaya/ tarif dan Perilaku pelaksana** yang mendapatkan nilai 3,90 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu **Persyaratan** mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,92. Selanjutnya **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** dan **Sarana dan prasarana** mendapatkan nilai 3,2.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Tolong mesin cetak di pelayanan benoa di ganti”
- “Minta tambah mesin cetak lagi 1 Terimakasih untuk di Sunset agar mempermudah dalam waktu pencetakan ketika antrian terimakasih banyak”
- “Pelayanan sudah bagus, tapi pas cetak HC lama soalnya PC lelet jadi waktu habis nungguin cetak lama”
- “Tingkatkan pelayanannya,terutama untuk pengujian produk.”
- “Tolong upgrade sarana dan prasarana nya.(komputer)”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- **Waktu Penyelesaian** waktu penyelesaian merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik. Jika terjadi permasalahan atau kekurangan pada unsur ini, maka

- **Kompetensi pelaksana** menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan petugas pelayanan. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang belum merata, keterampilan komunikasi yang belum efektif, serta ketelitian dan responsivitas dalam memberikan pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat kendala teknis berupa perangkat komputer (PC) yang memiliki kinerja lambat, sehingga menghambat proses pengolahan data dan percetakan dokumen. Kondisi ini berdampak pada waktu penyelesaian layanan menjadi lebih lama dan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan.
- **Biaya/ tarif dan Perilaku pelaksana** menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam transparansi biaya layanan serta sikap petugas yang belum sepenuhnya ramah, responsif, dan profesional, sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. kondisi yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM

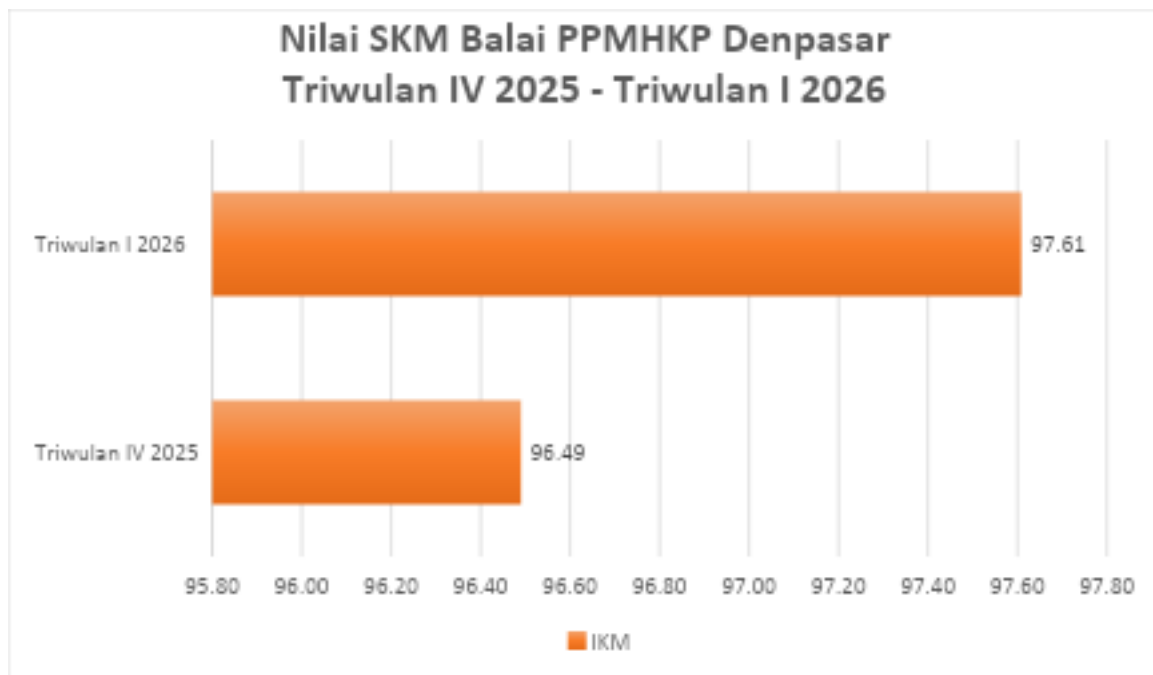
dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2026)			Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	

1	Waktu Penyelesaian	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, termasuk peremajaan perangkat komputer yang lambat, untuk mempercepat proses pelayanan dan percetakan dokumen.	√			Tim Pelayanan Publik
2	Kompetensi pelaksana	Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan		√		Tim Pelayanan Publik
3	Biaya/ tarif dan Perilaku pelaksana	Meningkatkan transparansi informasi biaya layanan melalui pemasangan papan informasi, media digital, dan publikasi lainnya.			√	Tim Pelayanan Publik

4.2 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi Penurunan nilai SKM penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2025 hingga triwulan I 2026 pada Balai PPMHKP Denpasar.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai PPMHKP Denpasar secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 97.61 Kemudian nilai SKM Balai PPMHKP Denpasar menunjukkan Penurunan Nilai SKM penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2025 hingga triwulan I 2026.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Kompetensi pelaksana, Biaya/ tarif dan Perilaku pelaksana
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Persyaratan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan Sarana dan prasarana.



Denpasar, 05 April 2026

Kepala Balai PPMHKP Denpasar

Siti Nurhafifah, S.St.Pi, M.Si

NIP. 19850811 201001 2 010

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Balai KIPM Denpasar

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Laporan hasil uji mutu produk perikanan

☐ Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)

☐ Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)

☐ Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

☐ Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)

☐ Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPOP)

☐ Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPH)

☐ Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

☐ Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

☐ Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Data Responden

Waktu Survey

01 Jul 2025 10:05

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s/d 45 Tahun

☐ 46 s/d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/POLRI

☐ Petaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wiraswasta Non KKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

Belum dapat di submit karena anda harus memilih Layanan terlebih dahulu

2. Hasil Pengolahan Data SKM

Data detail SKM untuk Triwulan 1 tahun 2026

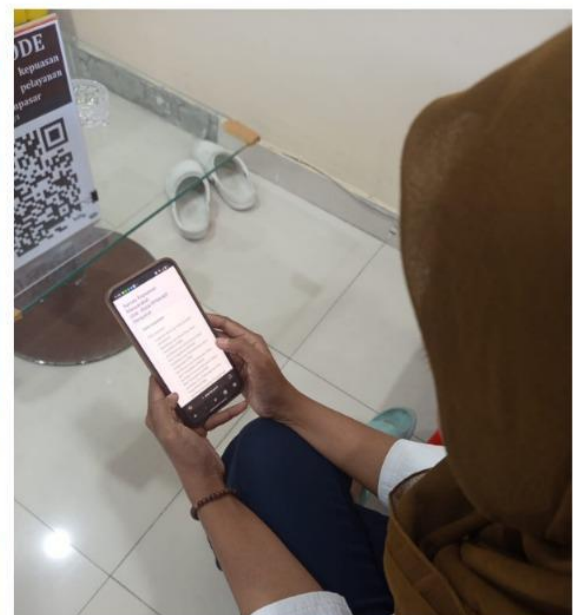
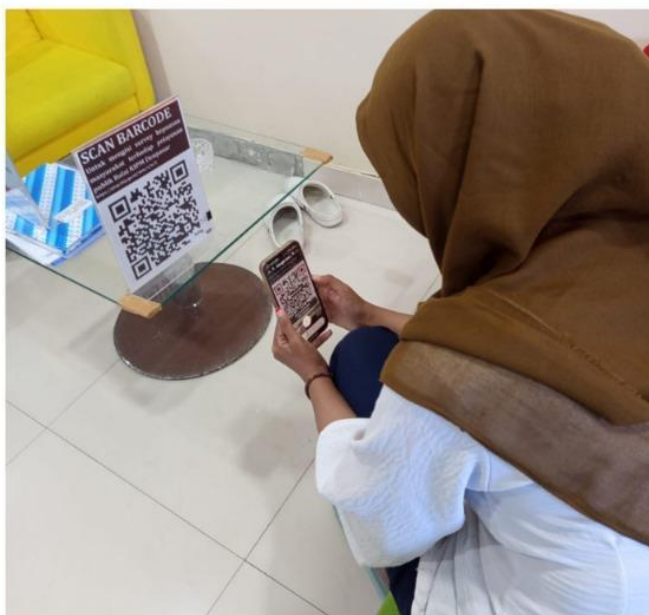
No. Survei	Triwulan	Tahun	Kd. Es	Nama UPP	Nama Layanan	Kategori Layanan	Jenis Usaha	Jenis Kelamin	Usia Responden	Pendidikan	Pekerjaan	Rating Petugas	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik, Saran	Kode Survei	Tgl. Data SKM	
174949	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.20.234-20260301-100148	31/3/2026
174986	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih banyak	114.10.156.58-20260330-165350	30/3/2026
174533	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga kedepannya lebih baik lagi	103.182.190.46-20260320-155553	30/3/2026
173866	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	<25	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik, ditingkatkan lagi	112.215.220.218-20260328-174007	28/3/2026
173566	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik Cepat mudah	114.79.18.115-20260327-110428	27/3/2026
173181	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat baik	114.10.156.225-20260326-085647	26/3/2026
173173	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah Baik dan Bagus	112.215.240.125-20260326-083633	26/3/2026
173104	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Laporan hasil uji mutu produk perikanan		P	P	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat cepat dan terstruktur	110.139.71.107-20260325-191019	25/3/2026
173101	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tolong mesin cetak di pelayanan benes di ganti	112.215.63.182-20260325-184209	25/3/2026
172996	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.21.92-20260325-121032	25/3/2026
172871	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Cepat baik mudah	114.79.22.132-20260324-080137	24/3/2026
172805	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat baik dan cepat	114.122.165.158-20260320-123530	20/3/2026
172739	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	SPHHP BALI MANTAP	114.10.157.3-20260318-122437	18/3/2026
172725	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.18.246-20260318-094908	18/3/2026
172628	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.18.164-20260317-101200	17/3/2026
172533	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	SMA	wirusaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Menarik baik bahili	114.122.142.24-20260316-153145	16/3/2026
172451	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mudah baik centik	114.79.23.172-20260316-110921	16/3/2026
172350	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	P	<25	D3	swasta	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Cepat Sesuai Ramah	114.122.136.179-20260315-093148	15/3/2026
172333	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kali yoga is the best	112.215.63.136-20260314-164223	14/3/2026
172331	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Laporan hasil uji mutu produk perikanan		P	P	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pengurusan berkas cepat tepat dan ligit	180.254.9.36-20260314-140209	14/3/2026
162423	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah Baik dan Bagus	112.215.220.221-20260312-081940	12/3/2026
162416	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat bermutu dan berkualitas	114.10.156.206-20260311-191533	11/3/2026
162412	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.20.149-20260311-112953	11/3/2026
162402	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	P	25-45	SMA	swasta	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Layanan yang dilakukan sangat baik	112.215.63.195-20260310-122239	10/3/2026
162398	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.23.232-20260310-104326	10/3/2026
162359	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat cepat dan mudah	114.122.165.105-20260309-123426	9/3/2026
162268	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.18.153-20260308-115249	8/3/2026
162266	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sudah baik dan cepat	114.122.140.172-20260308-124622	8/3/2026
162181	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sudah cepat dan baik	114.122.133.150-20260307-124139	7/3/2026
162180	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sangat cepat dan mudah	114.122.142.96-20260307-123950	7/3/2026
162154	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.20.124-20260307-093307	7/3/2026
161965	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Laporan hasil uji mutu produk perikanan		K	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yang sangat memuaskan	96.85.196.248-20260305-124601	5/3/2026
161960	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.21.89-20260305-115833	5/3/2026
161873	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga selalu dapat memberikan pelayanan terbaik	114.10.157.174-20260304-182808	4/3/2026
161872	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	S1	P.LKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat ramah	114.122.142.93-20260304-181347	4/3/2026
161870	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan (SMKHP)		K	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat mudah dan cepat	114.122.138.55-20260304-162050	4/3/2026
161868	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	25-45	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sesuai dengan yang di harapkan	140.213.127.125-20260304-184138	4/3/2026
161848	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		P	L	<25	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat mudah	114.79.19.88-20260303-105915	3/3/2026
161771	1	2026	Imutu	Balai KIPM Denpasar	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH)		K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat mantap sekali	103.182.190.46-20260302-120121	2/3/2026
JUMLAH NILAI PER UNSUR												592	590	585	589	591	588	589	590	592	592				
RATA-RATA PER UNSUR												3.50	3.51	3.87	3.90	3.91	3.88	3.90	3.92	3.92					
NILAI INDEKS PER UNSUR												6.04	6.03	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.44	6.44					
NILAI INDEKS KEPuasan MASYARAKAT												97.61													

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	91,67	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	93,23	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	92,19	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	98,44	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,71	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	91,15	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	96,35	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	98,96	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	97,92	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

DOKUMENTASI PENGGUNA LAYANAN DALAM PENGISIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BALAI PPMHKP DENPASAR 2026



Surat Tugas Tim Pengelola SKM Balai PPMHKP Denpasar Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR**

JALAN SUNSET ROAD NOMOR 777 KUTA BADUNG BALI 80361
TELEPON (0361) 4727390, FAKSIMILE (0361) 8477427
LAMAM www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK ses.1013000000@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.737/BPPMHKP.DPS/KP.440/IV/2026**

T E N T A N G

**TIM KERJA ORGANISASI BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001-2015, 17025-2017, ISO 17020-2012, ISO 37001-2016 dan Kawasan Zona Integritas), perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini sebagai Tim Kerja organisasi lingkup Balai PPMHKP Denpasar;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat tugas ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi tim pelaksana Sistem Manajemen Mutu di Balai PPMHKP Denpasar.
- Dasar Hukum** : 1. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencabut sebagian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

**Key Performance Indicator dan Survey
Kepuasan Masyarakat**

**Moh. Qosyim Ayyubi, S.Pi
I Dewa Gede Eka Saputra**

4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan IV Tahun 2025



Balai Karantina

Ikan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan

Denpasar

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar periode triwulan IV tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3.86	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.85	A
3	Waktu Penyelesaian	3.87	A
4	Biaya/Tarif	3.88	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3.86	A
6	Kompetensi Pelaksana	3.84	A
7	Perilaku Pelaksana	3.85	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.86	A
9	Sarana dan Prasarana	3.87	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

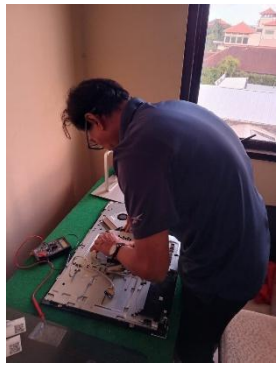
memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan IV 2025)			Penanggung Jawab
			Oktober	November	Desember	
1	Waktu Penyelesaian	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, termasuk peremajaan perangkat komputer yang lambat, untuk mempercepat proses pelayanan dan percetakan dokumen.	√			Tim IT
2	Kompetensi pelaksana	Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan		√		Tim Operator
3	Biaya/ tarif dan Perilaku pelaksana	• Meningkatkan transparansi informasi biaya layanan melalui pemasangan papan informasi, media digital, dan publikasi lainnya.			√	Tim Pelayanan Publik

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, termasuk peremajaan perangkat komputer yang lambat, untuk mempercepat proses pelayanan dan percetakan dokumen.	Sudah	Tim IT Melaksanakan Perbaikan PC di Sekretarian Benoa	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

2	Meningkatkan transparansi informasi biaya layanan melalui pemasangan papan informasi, media digital, dan publikasi lainnya	Sudah	Membuat Infografis biaya/tarif Layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
3	Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja Tim Operator secara rutin guna memastikan kesesuaian kompetensi dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	Sudah	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja Tim Operator		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Denpasar telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Tidak terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti.
3. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, termasuk peremajaan perangkat komputer yang lambat, untuk mempercepat proses pelayanan dan percetakan dokumen Kelautan dan Perikanan	Tim IT Balai PPMHKP Denpasar Melaksanakan Kegiatan Perbaikan PC di Seketarian Benoa	<3 bulan	Tim IT	Tim IT Balai PPMHKP Denpasar
2	Meningkatkan transparansi informasi biaya layanan melalui	Membuat Infografis biaya/tarif Layanan sesuai	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Tim Pelayanan Publik Balai PPMHKP

	pemasangan papan informasi, media digital, dan publikasi lainnya kepada pengguna jasa terkait persyaratan pelayanan	dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan			Denpasar
3	Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai secara rutin guna memastikan kesesuaian kompetensi dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja Tim Operator	<3 bulan	Tim Operator	Tim Operator Balai PPMHKP Denpasar

Denpasar, 05 April 2026

Pt. Kepala Balai PPMHKP Denpsar



[Handwritten signature]

Siti Nurlatifah, S.St.Pi, M.Si

NIP: 19850811 201001 2 010